KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ZLY0ETMN

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 0 6				H.4 X	Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 1 4 1 9 0 8 6 4 0 7 2 2 0 0 0						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : SYAHRANI						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01	16.310.000	16.310.000	0	15	2.446.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota						
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022						
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy					2 0 2 2 <i>уууу</i>	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor: Tanggal dd mm yyyy						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAEI	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :		$\overline{\Box}$				
C.4 Tanggal :	0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>			_	
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
	Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	lokumen ini tela	ah ditandatangani secara	